

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori agensi menurut Jensen dan Smith (1984):

“Konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan”.

Menurut Ismail (2008) dalam Ananta (2013), teori agensi memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berhubungan dengan perjanjian antar anggota di perusahaan. Teori ini berisikan mengenai pemantauan bermacam-macam jenis biaya dan memaksakan hubungan antara kelompok tersebut. Manajemen umumnya berusaha memaksimalkan kesejahteraan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, hal tersebut merupakan salah satu hipotesis dalam teori agency. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan akan memilih prinsip akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya dengan cara memilih prinsip akuntansi yang sesuai (Harahap, 2011).

Teori keagenan merupakan korelasi antara keagenan sebagai sebuah perjanjian dimana pemilik mempekerjakan orang atau manajer yang lain untuk mengelola kegiatan dalam perusahaan. Principal adalah seorang pemilik saham

atau disebut dengan seorang investor, dan agent adalah seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen dalam perusahaan. Pokok dari korelasi keagenan yakni adanya diferensiasi fungsi antara investor dan di pihak manajemen (Ramadona, 2016).

2.2. Kinerja Keuangan

Suatu kinerja keuangan digambarkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana suatu entitas. menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Indriyo dkk (2002):

“Rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Jika kinerja keuangan perusahaan tersebut baik, maka akan muncul investor-investor yang menanamkan modalnya untuk mendanai perusahaan yang akhirnya menjadi pemilik perusahaan sebesar modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut”.

Menurut Fahmi (2011):

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Secara garis besar, kinerja keuangan menjadi hasil dari pengukuran dan penilaian kinerja. Kinerja keuangan diukur menggunakan analisis rasio keuangan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan

mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang ditetapkan.

2.2.1. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2016 : 196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas yang peneliti gunakan ialah *return on assets* (ROA).

1. *Return on Assets* (ROA)

Return on assets menghubungkan laba bersih dengan total aktiva yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan atas penggunaan aktiva. *Return on assets* yang relatif rendah artinya perusahaan tidak atau belum mampu mendayagunakan aktiva seoptimal mungkin perusahaan lain yang sejenis. *Return on assets* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

2.3. Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Agoes dan Ardhana (2014):

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya”.

Menurut Effendi (2009):

“GCG merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi dan *stakeholder* lainnya. Dengan kata lain, GCG dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka menentukan tujuan, pencapaian dan penilaian kinerja perusahaan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu komponen non-keuangan yang menjadi isu penting dan perlu untuk dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan laba dan kinerja perusahaan.

2.3.1. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan UU No.40 tahun 2007, dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Di dalam sebuah dewan komisaris terdapat dewan komisaris independen. Pengertian dari dewan komisaris independen berdasarkan POJK Nomor 29 /POJK.05/2020, anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Dibentuknya suatu dewan komisaris independen memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang lebih objektif dan independen untuk menjaga keadilan dan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang

saham mayoritas dan kepentingan dari pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan *stakeholder* lainnya (Kuswiratmo, 2016). Menurut Choi dan Meek (2010), proporsi dewan komisaris independen dapat dihitung dengan rumus:

$$DKI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris}}$$

2.3.2. Dewan Direksi

Berdasarkan UU No.40 tahun 2007:

“Direksi adalah organisasi perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Mulyadi (2002:184) mendefinisikan dewan direksi merupakan dewan yang berguna untuk membentuk suatu kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena tercipta *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Ukuran dewan direksi = jumlah anggota dewan direksi

2.3.3. Komite Audit

Pengertian komite audit berdasarkan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite yang dibentuk dan oleh bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam

membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pengertian komite audit menurut Tugiman (1995), sebagai berikut :

"Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membentuk auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen."

Menurut Arents (2010), pengertian komite audit adalah:

"Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan."

Komite audit harus bersikap independen dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi. Proporsi komite audit dihitung dengan jumlah nominal komite audit yang bekerja dalam suatu perusahaan. Jika ditulis dengan rumus:

Ukuran komite audit = jumlah komite audit

2.4. Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Aryani (2011) adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Putu Ayu dan Gerianta (2018) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya. Semakin besar total aset maupun penjualan, maka akan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan.

Menurut Masud Maschfoedz (1994) dalam kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Perusahaan besar

Perusahaan yang dikategorikan ke dalam perusahaan besar adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih besar dari Rp10.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih dari Rp50.000.000.000 per tahun.

2) Perusahaan Menengah

Perusahaan yang dikategorikan ke dalam perusahaan menengah adalah perusahaan dengan kekayaan bersih antara Rp1.000.000.000 – Rp50.000.000.000 termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan antara Rp1.000.000.000 – Rp50.000.000.000 per tahun.

3) Perusahaan Kecil

Perusahaan yang dikategorikan ke dalam perusahaan kecil adalah perusahaan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000 per tahun.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma dari total aset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu:

$$SIZE = Ln(total\ aset)$$

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil
Aprianing sih (2016)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014	Variabel dependen: Kinerja keuangan Variabel independen: dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan	-Dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan -Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan -Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan -Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

Riniati (2015)	Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadao Kinerja Perusahaan	Variabel dependen: Kinerja keuangan Variabel independen: Komisaris independen, komite audit	-Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan -Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan
Sam'ani (2008)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di BEI	Variabel dependen: Kinerja keuangan Variabel independen: Kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, komisaris	-Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan -Aktifitas dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan

	2004-2007	independen, komite audit, leverage perusahaan	-Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Leverage berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan
Ananta (2013)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan dengan Ukuran perusahaan sebagai Variabel Kontrol	Variabel dependen: Kinerja keuangan Variabel independen: Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial Variabel kontrol: Ukuran perusahaan	-Dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan -Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan -Kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan -Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
Indriati	Pengaruh	Variabel	-Dewan komisaris independen

(2018)	<p><i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan</p>	<p>dependen: Kinerja keuangan</p> <p>Variabel independen: Dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>-Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan</p> <p>-Kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan</p>
Sukandar dan Rahardja (2014)	<p>Pengaruh Ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan</p>	<p>Variabel dependen: Kinerja keuangan</p> <p>Variabel independen: Dewan direksi, dewan komisaris, ukuran</p>	<p>-Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>-Ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan</p> <p>-Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan</p>

	Perusahaan	perusahaan	
--	------------	------------	--

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Melalui peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan, maka proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari hasil penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, yang berarti dewan komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannya *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris independen memiliki peran penting untuk meminimalisir adanya tindakan manajemen yang oportunistik. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan *good corporate governance* dapat tercipta. Jika *good corporate governance* dapat tercipta, maka dapat terjadi peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riniati (2015) dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriati.

H1 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.6.2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Dewan direksi adalah bagian penting dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan perusahaan, karena dewan direksi yang menentukan arah kebijakan perusahaan. Keputusan kebijakan perusahaan yang dibuat oleh dewan direksi inilah yang mempengaruhi secara langsung terhadap peningkatan kinerja suatu perusahaan. Bertambahnya jumlah anggota dewan direksi ini akan berkontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan perusahaan akan hubungan eksternal perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang besar akan menguntungkan perusahaan berdasarkan kebergantungan perusahaan akan sumber daya. Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang efektif, maka kebutuhan akan dewan direksi dalam jumlah yang besar juga akan semakin tinggi. Jika terjadi peningkatan kinerja perusahaan, maka hal ini akan terlihat di kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprianingsih (2016) dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008), Ananta (2013) dan Sukandar dan Rahardja (2014).

H2 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.6.3. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab secara langsung terhadap dewan komisaris. Komite audit diwajibkan untuk melaporkan hasil penelaahan dan analisisnya kepada dewan komisaris berupa penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit oleh auditor internal dan eksternal. Komite

audit juga memiliki peran untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan dan juga pelaporan keuangannya. Maka dari itu dengan adanya komite audit diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan yang relevan, tidak ada tindakan manipulasi dari pihak manapun dan terciptanya *good corporate governance*. Sehingga dengan adanya *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang ditunjukkan dari meningkatnya kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Aprianingsih (2016) komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Riniati (2015), Sam'ani (2008), Ananta (2013) dan Indriati (2018).

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan